

Maluku Dominan Pulau Pulau Kecil, Permasalahannya, dan Solusi: Peran Lulusan Geografer Universitas Pattimura

Maluku's Dominance of Small Islands, Its Problems, and Solutions: The Role of Geography Graduates from Pattimura University

Melianus Salakory*

Program Studi Pendidikan Geografi FKIP, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

***Corresponding Author**

E-mail: Salakory_m@gmail.com

ORCID iD: <http://orcid.org/0009-0003-5759-249X>

Info Artikel: Submitted: 23 Oktober 2023 | Revised: 29 Oktober 2023 | Accepted: 29 November 2023 | Published 28 Desember 2023

Abstrak: Pengelolaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, menjaga pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan peluang usaha melalui kerjasama bilateral. Pertimbangan unguensif lainnya adalah mengingat karakteristik biogeofisik Pulau Pulau Kecil begitu kompleks. Karakteristik biogeofisik sebagaimana disebutkan Agus Dermawan dalam presentasi nya yaitu: a) Terpisah dari pulau induk (mainland) sehingga bersifat insuler; b) Tidak mempunyai hinterland yang jauh dari pantai; c) Tidak mampu mempengaruhi hidroklimat laut; d) Daerah tangkapan air (catchment area) kecil; e) Keterbatasan sumber air tawar, daerah tangkapan air dan tanaman pangan; f) Eksistensi pulau kecil dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun; g) Sangat rentan terhadap perubahan iklim, baik akibat alam maupun ulah manusia. Pemecahan permasalahan daerah pesir dan pulau pulau kecil dilihat dari sudut pendekatan geografi, berupa ketersediaan data secara cepat, akurat, objektif. Data menjadi sangat penting dalam menentukan arah dan strategi kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan secara komprehensif khususnya pulau-pulau kecil. Menjawab kebutuhan tersebut, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pattimura dan para lulusannya termasuk stake holders dapat menjadikan beberapa bidang pekerjaan di era industri 4.0 dan transformasi digital serta society 5.0 ini sebagai prioritas kebijakan dan karier. Bidang bidang tersebut antara lain: 1.Analis citra satelit dan remote sensing; 2.Penghasil Peta: hasil remote sensing dan olahan citra satelit; 3.Analis, perencana, surveyor tata ruang kota; 4.Pekerja, analis bidang transportasi; 5.Edupreneurship; 6. Manajemen lingkungan; 8. Perusahaan swasta; 9. Manajemen bencana; 10. Pemandu wisata; 11.Jurnalis destinasi lingkungan.

Kata Kunci: Maluku, Pulau Kecil, Permasalahan, Solusi, Geografer

Abstract: *The management of small islands in border areas, especially islands directly adjacent to neighboring countries, is carried out in the context of maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, maintaining state defense and security, improving community welfare, and developing business opportunities through bilateral cooperation. Another important consideration is considering the complex biogeophysical characteristics of Pulau Kecil Island. The biogeophysical characteristics as mentioned by Agus Dermawan in his presentation are: a) Separated from the main island so that it is insular; b) Does not have a*

hinterland that is far from the coast; c) Not able to affect the marine hydroclimate; d) Small catchment area; e) Limited fresh water sources, water catchment areas, and food crops; f) The existence of small islands is influenced by coral reef ecosystems, mangrove forests and seagrass beds; g) Very vulnerable to climate change, both natural and man-made. Solving problems in coastal areas and small islands are seen from the point of view of a geographical approach, in the form of data availability quickly, accurately, and objectively. Data becomes very important in determining policy directions and strategies in planning and implementing and evaluating development comprehensively, especially for small islands. Responding to this need, the Geography Education Study Program at the University of Pattimura and its graduates including stakeholders can make several fields of work in the industrial era 4.0 and digital transformation and society 5.0 as policy and career priorities. These fields include 1. Analyst of satellite imagery and remote sensing; 2. Map Producer: remote sensing results and satellite image processing; 3. Analysts, planners, and urban spatial surveyors; 4. Workers, analysts in the field of transportation; 5. Edupreneurship; 6. Environmental management; 8. Private companies; 9. Disaster management; 10. Tour guide; 11. Environmental destination journalist.

Keywords: Maluku, Small Island, Problems, Solutions, Geographer

Panduan Sitasi: Salakory, M. (2023). Maluku Dominan Pulau Pulau Kecil, Permasalahannya, dan Solusi: Peran Lulusan Geografer Universitas Pattimura. *GEOFORUM Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, 2 (2), 100-113. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol2iss2pp100-113>

PENDAHULUAN

Secara geografis, Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, Provinsi Papua Barat di bagian Timur, Negara Timor Leste dan Negara Australia di bagian Selatan, serta Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian Barat. Sedangkan secara astronomi, Provinsi Maluku terletak antara 2o30' – 8o30' LS dan 124o – 135o30' BT.

Sebagai daerah kepulauan, maka Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. (<http://www.dpmpmsp-maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum>, 2021).

Sebagai daerah kepulauan bahkan dapat juga dikatakan provinsi kepulauan, Maluku memiliki sejumlah pesona hasil bumi darat maupun laut sehingga dikenang oleh beberapa penjelajah dunia sebagai The Spicy Island juga The Spice Island Exotic Marine Paradise (<https://indonesia-timur.co>maluku>).

Kepulauan dalam hal ini dapatlah didefinisikan sebagai suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud

alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian (Menurut UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan: Pasal (1) Ayat (4),

Daerah Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Daerah provinsi kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Daerah kabupaten/kota pada kepulauan adalah daerah kabupaten /kota yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya (jdih.bumn.go.id/, 2017)

Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan ?. Pasal 5 (1) [Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017](#) tentang Daerah Kepulauan menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan - kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

Kondisi wilayah kepulauan baik secara nasional maupun spesifik wilayah Maluku dengan sejumlah gugus pulau-pulau yang dalam pembahasan ini dikelompokkan secara administratif yakni 10 Kabupaten/ Kota. Pembahasan secara sistematis meliputi 3 bagian utama yaitu: 1) Wilayah Kepulauan; 2) Kondisi Geografis Wilayah Kepulauan; Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan; dan 3) Kondisi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil. Dengan demikian akhir dari pemaparan materi ini diharapkan peserta seminar memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang apa yang dimaksudkan dengan wilayah kepulauan; kondisi geografis wilayah kepulauan; Maluku sebagai wilayah kepulauan; kondisi pesisir dan pulau pulau kecil, dampak sebagai wilayah kepulauan, tujuan dan sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Maluku, urgensi pemecahan permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan geografi, serta dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan di wilayah kepulauan dengan dominasi pesisir dan pulau-pulau kecil.



Gambar 1. Atas: Pulau Selaru Perbatasan MTB, Bawah: Pulau Molana (Pulau Kecil) di Malteng. Sumber: Google.com



Gambar.2. Atas: Pantai Ohoidertawun Malra, Bawah: Banjir Rob Di Pesisir Pulau Ambon. Sumber: Google.com

1.1. Kondisi Geografis Wilayah Kepulauan

Setelah memahami konsep wilayah kepulauan, maka selanjutnya akan diperkenalkan bagaimana kondisi geografis wilayah kepulauan di Indonesia dan secara khusus kondisi geografis dari 12 gugus pulau di Maluku. Apa itu kondisi geografis ?

Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Permukaan bumi sendiri memiliki bermacam-macam kondisi geografis. Ini terjadi sebagai akibat dari pengaruh faktor endogen dan eksogen yang bekerja pada bumi. Kondisi geografis dapat dilihat melalui berbagai aspek yang meliputi:

1. Letak: lokasi geografis, luas, bentuk, dan posisi koordinat peta.
2. Relief: bagaimana bentuk permukaan atau kontur dan juga ketinggiannya.
3. Cuaca dan Iklim: cuaca dalam waktu tertentu di sebuah wilayah, iklim terkait bagaimana rata-rata terjadi dalam waktu tertentu.
4. Jenis tanah: kondisi tanah dan sejarah proses terbentuknya tanah.
5. Sumber daya: sumber daya air yang ada di sekitar wilayah tertentu.
6. Flora dan Fauna: keadaan hewan dan tumbuhan yang mendiami suatu wilayah.

Bagaimana Kondisi Geografis Indonesia Dan Pengaruhnya ? (pintar.jatengprov.go.id/, 2014)

1) Letak geografis Indonesia

Letak geografis Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang dilihat dari permukaan bumi secara nyata sesuai penampakan alam yang membatasi Indonesia. Letak geografis menekankan pada fenomena alam berupa keadaan alam yang melingkupi wilayah tersebut. Hal ini berarti benua, samudera, danau, laut dan sebagainya.

1.2. Letak Astronomis Indonesia

Letak astronomis Indonesia yaitu dimana posisi Indonesia yang dipengaruhi oleh garis khayal bumi yakni garis lintang dan bujur yang mengelilingi bumi. Dinamai garis khayal karena memang pada permukaan bumi sebenarnya, garis ini tidak ada hanya merupakan pengembangan ilmu astronomi pada cabang-cabang ilmu biologi. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis

HASIL DAN PEMBAHASAN

lintang (6o08' LU – 11o15' LS dan bujur 95o45' – 141o05' BT).

Pengaruh Letak Geografis dan Astronomis Indonesia. Beberapa hal yang mempengaruhi wilayah berdasarkan letak geografis :

- Mempengaruhi musim: Letak geografis Indonesia dilalui hembusan angin muson (monsoon). Angin muson membawa perbedaan musim Indonesia yang mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim penghujan dan kemarau yang panas. Angin muson bergerak bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali dalam 1 tahun .
- Wilayah strategis: Letak Indonesia yang berada diantara 2 benua dan 2 samudera membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan Internasional baik laut dan udara. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi pada zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilewati industri-industri besar.
- Letak astronomis Indonesia turut mempengaruhi :
 - Mempengaruhi iklim: oleh karena Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang berarti memiliki iklim tropis. Wilayah negara dengan iklim tropis akan memperoleh sinar matahari sebagai pusat tata surya sepanjang waktu. Hal tersebut akan berbeda dengan yang terjadi pada iklim sub tropis yang memiliki 4 musim, begitu juga dengan daerah beriklim kutub.
 - Mempengaruhi perbedaan waktu: perbedaan waktu yang ditetapkan mulai pada titik lintang dan bujur 0o pada kota Greenwich di Inggris. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu yaitu WIB, WIT dan WITA sesuai Keputusan Presiden No.41 Tahun 1987.

1.3. Maluku Sebagai Daerah Kepulauan

Wilayah Provinsi Maluku sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Irian/ Provinsi Papua dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi/ Laut Sulawesi dan posisi Provinsi

Maluku terletak antara 20 30 ' - 9 0 Lintang Selatan dan 1240 - 136 0 Bujur Timur.

Batas Wilayah Provinsi Maluku

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Seram
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Pulau Irian
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Pulau Sulawesi.

1.3.1. Kabupaten Maluku Barat Daya

1.1.Letak Dan Luas

Secara astronomis, Kabupaten Maluku Barat Daya terletak antara 6030"24" - 80 24'36" LS, dan 1300 37'47" - 13004'12" BT. Secara geografis, Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Timor dan Selat Wetar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kepulauan Alor.

1.3.2. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)

1. Letak Dan Luas

Secara astronomi Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak pada posisi 60o34' 24" – 80o 24' 36" Lintang Selatan dan 130o 37' 47" – 133o 4' 12" Bujur Timur. Secara geografi Kabupaten Maluku Tenggara Barat berbatasan dengan wilayah- wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Banda
- Sebelah Selatan : Laut Timur dan Australia
- Sebelah Barat : Kabupaten Maluku Barat Daya
- Sebelah Timur : Laut Arafura

Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan kepulauan dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang memiliki luas keseluruhan 52.995,19 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km²

(19,06%) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km² (80,94%). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Wermaktian yaitu 15.427,95 km² (29,11% dari luas keseluruhan).

1.3.3. Kabupaten Maluku Tengah

1. Letak dan Luas

Daerah Kabupaten Maluku Tengah terletak pada 2°30"-7°30" Lintang Selatan dan 125°45" - 132°30" Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Maluku Tengah dibatasi oleh : Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten SBB, pulau Buru; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten SBT, perairan Papua.

Luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah seluruhnya ± 275.907 Km² yang terdiri dari luas laut 264.311,43 Km² dan luas daratan 11.595,57 Km². Luas pulau dan kepulauan di Kabupaten Maluku Tengah sesuai hasil survey persemakmuran Tahun 1954 sebagai berikut :

1. 1Pulau Ambon : 384 Km² + 377 Km² adalah Wilayah Kota Ambon.
2. Pulau Haruku : 150 Km².
3. Pulau Saparua dan Nusa Laut : 209 Km².
4. Kepulauan Banda : 172 Km².
5. Pulau Seram dan Pulau-Pulau Kecil : 10.680,57 Km²

Kabupaten Maluku Tengah memiliki potensi pulau-pulau yang tersebar dalam wilayah sebanyak 49 pulau.

1.3.4. Kabupaten Seram Bagian Barat

1.Letak , dan Luas

Secara astronomis Kabupaten Seram Bagian Barat terletak antara 01° 19' - 07° 16' Lintang Selatan dan 127°20' - 129°1' Bujur Timur. Secara geografis mempunyai batas wilayah yaitu :

1. Utara : Laut Seram
2. Selatan : Laut Banda
3. Barat : Selat Buru
4. Timur : Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 62 buah pulau , yang berpenghuni hanya 10 buah pulau, dan 52 buah pulau tanpa berpenghuni.

Perlipatan yang terdiri atas antiklin dan sinklin yang berarah Timur – Barat di daratan Seram Bagian Barat.

1.3.5. Kabupaten Buru Selatan

1.Letak dan Luas

Secara astronomis Kabupaten Buru Selatan terletak antara 20 25' – 305' Lintang Selatan dan 121o221' - 1250 21' Bujur Timur. Luas wilayahnya 6.723 Km², yang terdiri dari luas laut 1.663 Km² dan luas daratan 5.060 Km².

Secara geografis wilayah Kabupaten Buru Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Buru
- Sebelah Selatan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur dengan Selat Manipa
- Sebelah Barat dengan Laut Buru

1.3.6.Kabupaten Buru

1.Letak dan Luas

Secara astronomis Kabupaten Buru terletak antara 2°25 LS - 3°55 LS dan antara 125°70 BT - 127°21 BT. Secara geografis Kabupaten Buru terletak pada batas-batas: Laut Seram di sebelah utara, Kabupaten Buru Selatan disebelah selatan, Laut Buru di sebelah barat dan Selat Manipa di sebelah Timur. Luas Pulau Buru (9.599 km²), dengan panjang (140 km) dan lebar (90 km). puncak bukit/gunung tertingginya adalah Kan Palatmada (2.429 m). Terdapat 3 (tiga) blok pegunungan yang masing-masing dipisahkan oleh struktur kelurusan lembah.

Bila ditinjau dari luasnya menurut kecamatan, maka kecamatan terbesar adalah kecamatan Air Buaya (4.534 Km² atau 59,70% dari luas kabupaten), kemudian diikuti oleh Kecamatan Waeapo (1.232 Km² atau 16,22% dari luas kabupaten) dan terkecil terdapat pada Kecamatan Bata Bual (292,60 Km² atau 3,85% dari luas kabupaten).

1.3.7.Kabupaten Seram Bagian Timur

1.Letak Dan Luas

Secara astronomis Kabupaten Seram Bagian Timur terletak pada 02° 50' – 04° 40' LS dan 128° 20' -130° 10' BT. Secara geografis Kabupaten Seram Bagian Timur berbatasan dengan: Sebelah Utara adalah Laut Seram, Sebelah Selatan adalah Laut Banda, Sebelah

Timur adalah dan Laut Arafura, dan Sebelah Barat adalah Kabupaten Maluku Tengah. Luas wilayah mencapai 15.887,92 km², yang mencakup luas wilayah daratan 3.952,08 km², dan wilayah lautan 11.935,84 km².

Kondisi geografis sangat bervariasi, sehingga mengakibatkan Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki wilayah yang sulit diakses dengan jalan darat antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, baik yang menghubungkan wilayah bagian utara dan selatannya, maupun wilayah timur dan baratnya. Hal ini di sebabkan oleh kondisi pegunungan dan perbukitannya yang mempunyai lereng yang terjal dan curam, dengan kondisi iklim yang memiliki curah hujan sangat tinggi, sehingga sungi- sungai besar sering terjadi banjir.

1.4. Kondisi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil

Apa yang dimaksud pulau-pulau kecil? Pasal 1 UU No. 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: ... Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Pada hakekatnya pulau kecil dicirikan oleh adanya "keterisolasian" dari pulau utama (main land) – dimana pada umumnya memiliki keterbatasan dari kapasitas daya dukung lingkungannya. Menurut Salm, Clark dan Siirila (2000), ada empat type pulau kecil, yakni: pertama, pulau yang tak berpenghuni dan jarang dikunjungi manusia. Kedua, adalah pulau yang tak berpenghuni namun secara teratur dikunjungi oleh manusia. Ketiga, adalah pulau yang berpenghuni dengan memiliki kegiatan ekonomi yang tradisional. Keempat adalah pulau yang berpenghuni dengan memiliki kegiatan ekonomi perdagangan dimana sangat tergantung terhadap kegiatan ekport.

Berapa jumlah pulau kecil terluar ? Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang telah diubah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan atas jumlah pulau kecil terluar menjadi 111 pulau. "Penetapan pulau-pulau

kecil terluar itu diklasifikasikan atas nama pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar, dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi," tulis keppres tersebut. Seiring diterbitkannya Keppres 6/2017,

Presiden Jokowi mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (17.kkp.go.id/an-component/, 2017)

Berikut Daftar 111 pulau-pulau kecil terluar:

1. Provinsi Kepulauan Riau - Pulau Berakit - Pulau Sentut - Pulau Tokong Malang Biri - Pulau Damar - Pulau Mangkai - Pulau Tokong Nanas - Pulau Tokongbelayar - Pulau Tokongboro - Pulau Semiun - Pulau Sebetul - Pulau Sekatung - Pulau Senua - Pulau Subi Kecil - Pulau Kepala - Pulau Tokonghiu Kecil - Pulau Karimun Anak - Pulau Nipa - Pulau Pelampung - Pulau Batuberantai - Pulau Putri - Pulau Bintang - Pulau Malang Berdaun
2. Provinsi Kalimantan Utara: - Pulau Sebatik - Karang Unarang
3. Provinsi Kalimantan Timur: - Pulau Maratua - Pulau Sambit
4. Provinsi Sulawesi Tengah: - Pulau Lingian - Pulau Solando - Pulau Dolangan
5. Provinsi Sulawesi Utara: - Pulau Bongkil (Pulau Bangkit) - Pulau Mantehage (Pulau Manterawu) - Pulau Makalehi - Pulau Kawaluso - Pulau Kawio - Pulau Marore - Pulau Batuwaikang - Pulau Miangas - Pulau Marampit - Pulau Intata - Pulau Kakorotan - Pulau Kabaruan
6. Provinsi Maluku Utara - Pulau Yiew Besar
7. Provinsi Papua Barat - Pulau Moff (Pulau Budd) - Pulau Fani - Pulau Miossu
8. Provinsi Papua: - Pulau Fanildo - Pulau Bras - Pulau Befondi - Pulau Liki - Pulau Habe - Pulau Komolom - Pulau Kolepom - Pulau Laag - Pulau Puriri
9. Provinsi Maluku: - Pulau Ararkula - Pulau Karerei (Pulau Karaweira Besar) - Pulau Penambulai - Pulau Kultubai Utara - Pulau Kultubai Selatan - Pulau Karang - Pulau Enu - Pulau Batugoyang - Nuhuyut (Pulau Kei Besar) - Pulau Larat - Pulau Sutubun - Pulau Selaru - Pulau Batarkusu - Pulau Marsela - Pulau Metimarang -

- Pulau Letti - Pulau Kisar - Pulau Wetar - Pulau Lirang
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): - Pulau Alor - Pulau Batek - Pulau Rote - Pulau Ndana - Pulau Sabu - Pulau Dana - Pulau Mangudu
 11. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): - Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
 12. Provinsi Bali: - Pulau Nusa Penida
 13. Provinsi Jawa Timur: - Pulau Nusabarong (Pulau Barong) - Pulau Ngekel (Pulau Sekel) - Pulau Panikan
 14. Provinsi Jawa Tengah: - Pulau Nusakambangan
 15. Provinsi Jawa Barat: - Pulau Batukolotok - Pulau Nusamanuk
 16. Provinsi Banten: - Pulau Deli - Pulau Karangpabayang - Pulau Guhakolak
 17. Provinsi Lampung: - Pulau Bertuah (Pulau Batu kecil)
 18. Provinsi Bengkulu: - Pulau Enggano - Pulau Mega
 19. Provinsi Sumatera Barat: - Pulau Sibaru-baru - Pulau Pagai Utara - Pulau Niau
 20. Provinsi Sumatera Utara: - Pulau Simuk - Pulau Wunga - Pulau Berhala
 21. 21 Provinsi Aceh: - Pulau Simeulue Cut - Pulau Salaut Besar - Pulau Raya - Pulau Rusa - Pulau Bateleblah - Pulau Rondo - Pulau Weh
 22. Provinsi Riau: - Pulau Baturmandi - Pulau Rupa - Pulau Bengkalis - Pulau Rangsang (111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia (18.kkp.go.id/djprl/p4k/infografis-detail/, 2017)

Mengapa penting pengelolaan pulau-pulau kecil? Pengelolaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, menjaga pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan peluang usaha melalui kerjasama bilateral (16. www.jogloabang.com/pustaka/, 2007)

Pertimbangan unguensif lainnya adalah mengingat karakteristik biogeofisik Pulau Pulau Kecil begitu kompleks. Karakteristik biogeofisik sebagaimana disebutkan Agus

Dermawan dalam presentasi nya yaitu: a) Terpisah dari pulau induk (mainland) sehingga bersifat insuler; b) Tidak mempunyai hinterland yang jauh dari pantai; c) Tidak mampu mempengaruhi hidroklimat laut; d) Daerah tangkapan air (catchment area) kecil; e) Keterbatasan sumber air tawar, daerah tangkapan air dan tanaman pangan; f) Eksistensi pulau keci dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun; g) Sangat rentan terhadap perubahan iklim, baik akibat alam maupun ulah manusia (19. www.batukarinfo.com/, 2011)

Mengapa penting mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

- bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional ;

Pasal 4 UU dimaksud juga menyebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- 1.3. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- 1.4. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- 1.5. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- 1.6. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (16, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-27-2007, 2007>)

Bagaimana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil ?. Dalam Ketentuan Umum UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir (16, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-27-2007, 2007>)

Apa Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau Pulau Kecil di Maluku ?. Tujuan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku:

- a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-

- pulau kecil, secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat peranserta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mengkomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi sumber daya dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- i. mengkomodasi dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokalita melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (20, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/32457/perda-prov-maluku-no-10-tahun-2013, 2013>)

Sasaran Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku:

- a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara sinergis;
- c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 11 Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara partisipatif sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat; dan
- i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir (20,

2.1. Peran Lulusan Program Studi Pendidikan Geografi

Dari sudut pendekatan geografi, ketersediaan data secara cepat, akurat, objektif, dan menjadi urgensi dalam menentukan arah dan strategi kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan secara komprehensif khususnya pulau-pulau kecil. Penyediaan data secara cepat, akurat, objektif, objektif, dan tidak mahal dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknologi Remote Sensing dan SIG dibandingkan dengan model konvensional yang selama ini dipergunakan.

Pengumpulan Data pada Lingkungan Pulau Pulau Kecil Melalui Aplikasi RS dan SIG seperti melalui foto udara dan citra satelit. Citra satelit merupakan gambaran objek-objek yang terdapat di permukaan dan dekat permukaan bumi, yang direkam oleh sebuah satelit yang beroperasi di luar angkasa, dengan jarak ratusan kilometer di atas paras bumi.

Diperhadapkan dengan kondisi geografis alam Maluku sebagai potensi sekaligus juga sebagai tantangan dalam pengembangan Maluku sebagai center of development maritim and small islands di

kancah nasional dan bahkan internasional, maka Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura bertumbuh dengan dengan mimpi besarnya: “mewujudkan layanan prima untuk menghasilkan calon geographer yang professional, edupreneur dan berkarakter laut pulau”.

Misi yang diemban adalah; 1.Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mempersiapkan pendidik yang profesional, edupreneur, dan memiliki karakter laut pulau; 2.Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan aksentuasi pada pengembangan karakter laut pulau; 3.Melaksanakan layanan prima dan tata kelola yang baik sehingga memberi kepuasan kepada pelanggan dan memberi pencitraan yang baik kepada public.

Setiap orang yang sudah selesai belajar di Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unpatti akan menguasai ketrampilan dan memiliki pengetahuan sebagai berikut:

1. Sikap

Memiliki sikap memuliakan laut sebagai komitmen daerah kepulauan dengan luas laut 2/3 lebih luas dari luas daratannya dengan 12 gugus pulau sesuai RTRW Provinsi Maluku pada tahun 2017.

2. Kerampilan Umum:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dankreatif;
- c. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argument atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan

pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;

- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- f. Mampu meningkatkan mutu sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu melaksanakan tugas profesional guru sesuai tuntutan peraturan perundangan bidang pendidikan dan kode etik guru Indonesia yang berlaku;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

3. Keterampilan Khusus

- a. Mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, meliputi:
 - 1) Merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan;
 - 2) Menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran; dan
 - 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai isi pada kurikulum yang berlaku;
- b. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah

pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri (self-regulated learner);

- c. Mampu mengaplikasikan konsep laut-pulau secara terintegratif dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi:
 - 1) melaksanakan penilaian otentik-holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 - 2) menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- e. mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah sains geografi dan pembelajarannya sesuai kaidah penelitian ilmiah;
- f. mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya ; dan
- g. mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pesertadidik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif.
- h. Mampu untuk membuat, mengembangkan, dan menggunakan alat peraga berbasis bahan local dengan menerapkan prinsip konservasi.
- i. Mampu membimbing siswa di kelas untuk melakukan penelitian tindakan berbasis laut-pulau secara terintegratif.

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai teori aplikasi secara mendalam; dasar dasar geografi, geomorfologi dasar, geologi dasar, meteorologi dan klimatologi + praktek, ekologi dan lingkungan, geografi tanah + praktek, sosiologi, geografi sosial, hidrologi = praktek, geomorfologi Indonesia, geografi ekonomi, geologi Indonesia, geografi perdesaan, geografi perkotaan, oseanografi = praktek, geografi regional dunia, kosmografi, kartografi = praktek, geografi pariwisata, geografi transportasi, penginderaan jauh + praktek, geografi regional Indonesia, pengkajian kurikulum & buku paket geografi (SMP+SMA), statistic dasar,

geografi fisik terapan penunjang pembangunan daerah, geografi sosial terapan penunjang pembangunan daerah, geografi antar bidang terapan penunjang pembangunan daerah...

- b. Menguasai pengetahuan dan pembelajaran berbasis laut - pulau

Dengan demikian setiap lulusan Pendidikan geografi FKIP Universitas Pattimura selain diprioritaskan menjadi seorang Guru Geografi, akan menjadi survive dalam beberapa bidang pekerjaan di era industri 4.0 dan transformasi digital serta society 5.0. Bidang bidang tersebut antara lain :

- 1). Analis citra satelit dan remote sensing

Bidang ini semakin diminati seiring dengan kebutuhan data lapangan muka bumi secara akurat, objektif dan tepat waktu. Jika pada beberapa waktu lalu untuk mendapatkan data lapangan muka bumi orang lebih mengandalkan survey lapangan yang tentu saja membutuhkan tenaga surveyor, dana yang besar serta waktu yang lama jika daerah yang daripadanya akan diperoleh informasi, maka belakangan ini apalagi di era kemajuan transformasi maka dengan menerapkan metode remote sensing dengan data hasil olahan citra satelit akan menjadi pilihan utama terutama bagi kalangan peneliti, perencana, pengambil kebijakan, bahkan dari pihak mahasiswa.

1. Penghasil Peta: hasil remote sensing dan olahan citra satelit

Pemanfaatan data dari citra satelit oleh para mahasiswa sebagian besar diperuntukan bagi kebutuhan hasil penelitian skripsi atau tugas akhir. Informasi dari hasil olahan citra satelit tersebut kemudian digambarkan secara spasial ketersediaan dan distribusinya menjadi peta-peta tematik yang sangat dibutuhkan bagi penulisan skripsi mahasiswa. Beberapa program studi atau bidang kajian yang sangat identik dengan perpetaan dikarenakan memerlukan peta dalam penulisan skripsi mereka misalnya; geografi, lingkungan, biologi, fisika, teknik, transportasi, perikanan dan kelautan, ekonomi, sosial, hukum, bahkan kedokteran dan kesehatan sekalipun akan bersinggungan dengan peta. Ini peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh lulusan program Studi Pendidikan Geografi Unpatti.

- 2). Analis, perencana, surveyor tata ruang kota

Informasi yang dihasilkan dari hasil olahan citra satelit dalam bentuk peta tematik akan menjadi rujukan dari para perencana tata ruang kota. Dengan kebijakan peta satu pintu yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi ini pun juga akan menjadi peluang dalam menyerap lulusan Program Studi Pendidikan Geografi.

- 3) Pekerja, analis bidang transportasi

Hal yang sama akan berpeluang juga untuk jasa pekerja dan analis dalam bidang transportasi.

- 4) Edupreneurship

Lulusan Program Studi masih tetap survive jika berwirausaha dalam bidang Pendidikan dengan menyediakan jasa pengolahan dan analisis data statistik hasil penelitian, membuat dan mengembangkan media pembelajaran virtual, memberi pendampingan kepada siswa yang akan mengikuti turnamen tertentu (olimpiade kebumihan), ujian akhir, tes masuk PT.

- 5) Manajemen lingkungan

Sebagai lulusan jurusan Geografi, kamu juga bisa menjadi ahli manajemen lingkungan. Profesi seperti analis lingkungan banyak dibutuhkan pemerintah maupun perusahaan swasta. Biasanya untuk melakukan penelitian dan analisis sebelum dilakukan perubahan seperti mendirikan bangunan, dan lain sebagainya.

- 6) Perusahaan swasta

Perusahaan swasta khususnya yang bergerak di bidang tambang minyak bumi, gas, mineral dan sebagainya tentunya membutuhkan ahli geografi untuk berbagai posisi seperti peneliti, analis, surveyor, pengawas, dan lain sebagainya. Orang dapat bekerja di perusahaan-perusahaan ini sesuai bidang yang dikuasai.

- 7) Manajemen bencana

Indonesia merupakan wilayah yang rentan bencana alam seperti banjir, gempa

bumi, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Sebagai lulusan Geografi, kamu bisa mencari peluang kerja di lembaga mitigasi bencana nasional dan memanfaatkan ilmu kamu untuk menjadi bagian dari tim yang menanggulangi bencana serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan bencana.

8) Pemandu wisata

Pemandu wisata juga merupakan peluang kerja yang asyik bagi lulusan Geografi. Dengan pengetahuan geografis yang baik, kita akan sangat cocok menjadi seorang pemandu wisata. Tentu saja kita juga membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik untuk menekuni profesi ini. Bekerja sambil berjalan-jalan terlihat sungguh menyenangkan.

9) Jurnalis destinasi lingkungan

Zaman modern masyarakat generasi abad 21 menggunakan kecanggihan teknologi sebagai wadah Komunikasi media membranding wilayah yang memiliki potensi pariwisata agar terekspos dalam ruang virtual publik.



Sumber Foto: google.com, tahun 2021

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil ?, serta apa tujuan dan sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau Kecil di Maluku.

Urgensi pemecahan permasalahan daerah pesisir dan pulau pulau kecil dilihat dari sudut pendekatan geografi, berupa ketersediaan data secara cepat, akurat, objektif. Data menjadi urgensi dalam menentukan arah dan strategi kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan secara komprehensif khususnya pulau-pulau kecil.

Terkait kesimpulan pada butir 1 dan 2, maka disarankan kepada Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pattimura dan para stake holdersnya termasuk pengguna lulusan agar para lulusannya agar dapat menjadikan beberapa bidang pekerjaan di era industri 4.0 dan transformasi

Peluang yang ada di depan mata kita dan sering menyediakan berita-berita viral adalah menjadi seorang youtuber dengan membuat vlog yang mengusung konten lingkungan, pariwisata, dan perjalanan.

KESIMPULAN

Wilayah kepulauan dalam kajian ini secara spesifik berbicara tentang mengapa Indonesia disebutkan sebagai negara kepulauan dan apa dampaknya. Kondisi geografis wilayah kepulauan meliputi letak dan luas, relief, cuaca dan iklim, jenis tanah, sumber daya alam dan manusia, bagaimana kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya.

Kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membicarakan letak dan luas, relief, cuaca dan iklim, jenis tanah, sumber daya alam dan manusia dari masing-masing 8 wilayah Kabupaten/ Kota dengan karakteristik pesisir dengan dominasi pulau-pulau kecil. Kondisi pesisir dan pulau-pulau kecil fokus membicarakan apa yang dimaksud pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil terluar menurut ketentuan [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 38 Tahun 2002](#), mengapa penting pengelolaan pulau-pulau kecil, mengapa penting mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?, serta bagaimana

digital serta society 5.0 ini sebagai prioritas karier. Bidang-bidang tersebut antara lain:

1. Analisis citra satelit dan remote sensing;
2. Penghasil Peta: hasil remote sensing dan olahan citra satelit;
3. Analisis, perencanaan, surveyor tata ruang kota;
4. Pekerja, analisis bidang transportasi;
5. Edupreneurship;
6. Manajemen lingkungan;
7. Perusahaan swasta;
8. Manajemen bencana;
9. Pemandu wisata;
10. Jurnalis destinasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. 1997, ciptakarya.pu.go.id. Retrieved Agustus 10, 2021, f. PP Nomor 47 Tahun 1997, Tata Ruang Wilayah Nasional Republik Indonesia

2. 2014, <http://jdih.kkp.go.id>. Retrieved Agustus 10, 2021, f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 2017, <https://jdih.bumn.go.id/>. Retrieved Agustus 10, 2021, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 . Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi
3. 2013, Oktober 21)., Garis Pantai Indonesia
4. 2021, Juli 27). https://id.wikipedia.org/wiki/geografi_Indonesia#cite_note-1. Retrieved Agustus 11, 2021,
5. 2021, Juli 27). https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia?veaction=edit§ion=7#Kepulauan_Sunda_Besar . Retrieved Agustus 11, 2021, from https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia?veaction=edit§ion=7#Kepulauan_Sunda_Besar), Geografi Indonesia, update 27 Juli 2021
6. 2015, <http://pintar.jatengprov.go.id/>. Retrieved Agustus 10, 2021, from http://pintar.jatengprov.go.id/uploads/users/tarjani/materi/SD_Letak_Geografis_dan_Astronomis_Indonesia_serta_Pengaruhnya_2014_2015/Letak_Geografis_dan_Astronomis_Indonesia_serta_Pengaruhnya.pdf
7. 2015, Maret 24). <https://maluku.bps.go.id>. Retrieved Agustus 10, 2021, from https://maluku.bps.go.id/sub_jekt/153/geografi.html#subjekViewTab3, Maluku Dalam Angka Tahun 2020
8. 2016, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_755fbccc6c_BAB%20IIBAB%202_Gambaran%20Uumum%20Kondisi%20Wilayah-%20MBD.pdf, RPIJM Bidang PU/ . Retrieved Juli 30, 2021, from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_755fbccc6c_BAB%20IIBAB%202_Gambaran%20Uumum%20Kondisi%20Wilayah-%20MBD.pdf, RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Ta
9. 2016, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_86f23cb3a6_BAB%20IIBab%202%20-%20Kondisi%20OUmum%20Daerah.pdf. Retrieved Juli 30, 2021, from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_86f23cb3a6_BAB%20IIBab%202%20-%20Kondisi%20OUmum%20Daerah.pdf, RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Maluku Tengah
10. 2016, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_b867b049d6_BAB%20VRPIJM%20MALTENG.pdf. Retrieved Agustus 11, 2021, from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_b867b049d6_BAB%20VRPIJM%20MALTENG.pdf, Rencana Program Infestasi Jangka Menengah Bidang PU/ Cipta Karya Tahun 2012-2016 Kabupaten Maluku Tengah, Bab. II. Gambaran Umum
11. 2016, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_a3a9c03bdf_BAB%20Ibab%201%20Pendahuluan.pdf,. Retrieved Agustus 12. 2021, from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_a3a9c03bdf_BAB%20Ibab%201%20Pendahuluan.pdf, Rencana Terpadu Dan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) - Bidang Cipta Karya Kabupaten Seram Bagian Barat, Bab. II. Profil
13. (2016, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_fbee8827_a3_BAB%20IIBAB%203_Rencana%20Pembangunan-%20Buru%20Sel.pdf . Retrieved Juli 30,

- 2021, from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_fbee8827a3_BAB%20IIIBAB%203_Rencana%20Pembangunan-%20Buru%20Sel.pdf, RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2016
14. [sippa.ciptakarya.pu.go.id/](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_fbee8827a3_BAB%20IIIBAB%203_Rencana%20Pembangunan-%20Buru%20Sel.pdf) (2016, Retrieved from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_fbee8827a3_BAB%20IIIBAB%203_Rencana%20Pembangunan-%20Buru%20Sel.pdf, RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2016: 13. https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_fbee8827a3_BAB%20IIIBAB%203_Rencana%20Pembangunan-%20Buru%20Sel.pdf, RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2016
15. 2016, - -). 14. https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_6cb298562e_BAB%20IIIBAB%202_Gambaran%20Umum%20Kondisi%20Wilayah-%20Buru%20Sel.pdf, RPIJM Bidang PU/ . Retrieved Agustus 10, 2021, from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_6cb298562e_BAB%20IIIBAB%202_Gambaran%20Umum%20Kondisi%20Wilayah-%20Buru%20Sel.pdf, RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Buru, Tahun 2021
16. [sippa.ciptakarya.pu.go.id/](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_6cb298562e_BAB%20IIIBAB%202_Gambaran%20Umum%20Kondisi%20Wilayah-%20Buru%20Sel.pdf) (2016, Retrieved from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_6cb298562e_BAB%20IIIBAB%202_Gambaran%20Umum%20Kondisi%20Wilayah-%20Buru%20Sel.pdf, RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Buru, Tahun 2021
- Cipta Karya, Bab. II Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Buru, Tahun 2: https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_6cb298562e_BAB%20IIIBAB%202_Gambaran%20Umum%20Kondisi%20Wilayah-%20Buru%20Sel.pdf,